

Analisis Nilai Tukar Petani sebagai Indikator Kesejahteraan Petani di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2012-2014

(Analysis of Farmers Exchange as The Farmer's Welfare Indicator in East Java Province in the Period 2012-2014)

Eka Agustin Rahayu, Badjuri, Sarwedi
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ekaagustin967@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) keterwakilan perhitungan nilai tukar petani yang selama ini dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2014; (2) ketepatan dua alat ukur komplemen (nilai tukar alternatif) dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan petani yang sesungguhnya, (3) rumusan kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik tabulasi data dalam menghitung komponen nilai tukar petani komplementer. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tukar petani yang selama ini digunakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil petani di Jawa Timur. Penyertaan dua alat ukur komplemen menjadikan indikator kesejahteraan petani lebih jelas dalam menggambarkan keadaan petani saat ini. Nilai Tukar Konsumsi Petani (NTKP) menggambarkan daya beli riil petani terhadap barang konsumsi rumah tangga yang menurun berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini. NTFP menggambarkan daya beli petani terhadap input produksi usahatani. Perumusan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Timur ditinjau dari komponen perhitungan nilai tukar petani komplemen.

Kata Kunci: Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Konsumsi Petani (NTKP), Nilai Tukar Faktor Produksi Usahatani (NTFP), Kesejahteraan Petani

Abstract

The purpose of this study to analyze (1) the representative of the calculation farmers exchange rate who had been used as the farmer's welfare indicators in East Java province in the period 2012 to 2014; (2) the accuracy of two measuring devices complement (alternative exchange rate) in describing the actual level of farmer's welfare, (3) the formulation of policies related to improving the farmer's welfare in East Java. The analytical method used in this research is quantitative descriptive analysis that using data tabulation techniques in calculating the farmers exchange rate complementary components. The analysis showed that the farmers exchange rate who have not fully describe the real conditions of the farmers in East Java. Inclusion of two measuring devices complement farmer's welfare indicators made clearer in describing the state of the farmer. Farmers Consumption Exchange (NTKP) describe the real purchasing power of the farmers on household consumer goods decreased based on the calculation in this study. NTFP describe the purchasing power of farmers to farm production inputs. Formulation of policies improving the farmer's welfare in East Java in terms to calculation of the complement farmers exchange rate component.

Keywords: Farmers Exchange Rate (NTP), Farmers Consumption Exchange Rate (NTKP), Farm Production Factor Exchange (NTFP), Farmer's Welfare

Pendahuluan

Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat diberbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan nasional dengan jumlah rumah tangga tani yang hampir mencapai 50% dari rumah tangga total nasional. Perhatian terhadap kesejahteraan petani yang dibuktikan dari dominasi jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan pertanian menjadi prioritas pembangunan pertanian jangka panjang dalam

meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan petani yang menjadi tujuan pembangunan pertanian diprioritaskan pada provinsi Jawa Timur karena provinsi ini merupakan penyangga pangan nasional yang harus menyediakan pasokan bahan makanan untuk masyarakat se-Indonesia. Sebagai provinsi penyangga pangan nasional seharusnya masyarakat di Jawa Timur lebih terjamin kesejahteraannya dibandingkan dengan provinsi lain. Namun pada realitanya tiga tahun terakhir ini kesejahteraan petani di provinsi Jawa Timur terus terpuruk.

Perkembangan kesejahteraan petani dapat diketahui dengan menggunakan alat ukur yang selama ini digunakan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) yang dipublikasikan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai Tukar Petani menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Namun definisi BPS yang menjelaskan bahwa NTP tidak berkaitan langsung dengan nilai riil pendapatan rumahtangga tani menyebabkan belum ada penjelasan terkait konseptual yang meyakinkan NTP-BPS valid dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan rumah tangga pertanian. Beberapa kekurangan dalam penghitungan NTP memerlukan penyempurnaan penghitungan NTP yang lebih mendekati pengukuran kesejahteraan petani. Pengkajian ulang konsep perhitungan nilai tukar petani bertujuan untuk menelaah secara kritis apakah nilai tukar petani relevan digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani.

Dalam penelitian ini, selain menggunakan cara perhitungan BPS juga terdapat dua alternatif pengukuran nilai tukar petani sebagai pembanding relevansinya terhadap kesejahteraan petani yang dijadikan sebagai dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mencapai pembangunan pertanian yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia terutama petani di Jawa Timur dikarenakan mengalami keterpurukan yang disebabkan dari berbagai faktor. Kedua alat ukur alternatif tersebut adalah Nilai Tukar Konsumsi Petani (NTKP) dan Nilai Tukar Faktor Produksi Usahatani (NTFP) yang dinilai lebih memiliki hubungan langsung terhadap pengukuran kesejahteraan petani. Dengan penyertaan kedua alat ukur tersebut diharapkan memperoleh hasil perhitungan nilai tukar petani yang lebih relevan dan valid untuk dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik permasalahannya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fakta dengan cara interpretasi dari data yang berbentuk angka dari perhitungan nilai tukar petani serta menjelaskan relevansi nilai tukar petani sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian di Jawa Timur dikarenakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat dan sebagai penyangga pangan nasional yang berarti kesejahteraan petaninya menentukan hasil produksi pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan kurun waktu pengamatan 3 tahun dari tahun 2012-2014.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berbentuk data berkala (*time series*) dengan objek penelitian data nilai tukar petani (NTP), indeks harga yang diterima petani (IT), indeks harga yang dibayarkan petani (IB), indeks harga konsumsi rumah tangga pertanian (IHKP), dan indeks harga faktor produksi usahatani (IHFP). Sumber data diperoleh dari BPS Provinsi Jawa

Timur, PATANAS, internet, dan sumber lain yang dapat menunjang penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis tabulasi data untuk melihat jumlah NTP-BPS yang didefinisikan sebagai rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB), NTKP, dan NTFP yang merupakan nilai tukar komplemen dari NTP-BPS.

Analisis Tabulasi Data

a. Perhitungan NTP-BPS

Merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Rumus NTP adalah sebagai berikut :

$$NTP = (IT/IB) \times 100$$

Dimana :

NTP : Indeks Nilai Tukar Petani

IT : Indeks harga yang diterima petani

IB : Indeks harga yang dibayar petani

Dengan kriteria :

NTP >100 berarti petani mengalami surplus dan sejahtera

NTP =100 berarti petani mengalami BEP dan belum sejahtera

NTP <100 berarti petani mengalami defisit dan tidak sejahtera

b. Perhitungan NTKP

Merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga konsumsi petani yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NTKP = (IT/IHKP) \times 100$$

Dimana:

NTKP : Nilai tukar konsumsi petani

IT : Indeks harga yang diterima petani

IHKP : Indeks harga konsumsi petani

c. Perhitungan NTFP

Merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga faktor produksi usahatani yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NTFP = (IT/IHFP) \times 100$$

Dimana:

NTFP : Nilai tukar faktor produksi usahatani

IT : Indeks harga yang diterima petani

IHKP : Indeks harga faktor produksi usahatani

Analisis Deskriptif Naratif

Merupakan salah satu metode pemecahan atas permasalahan yang diteliti dengan menggambarkan kondisi dari objek penelitian yang dikaji secara teoritis maupun fakta empiris dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat

didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur yang berhubungan dengan nilai tukar petani.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data indeks harga yang diterima petani, indeks harga yang dibayar petani, indeks produksi pertanian, dan indeks konsumsi rumah tangga pertanian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data tersebut diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif sesuai dengan rumus yang telah disediakan, tujuannya untuk lebih mendukung hasil penelitian dari kedua permasalahan agar lebih komprehensif serta mencari alternatif solusi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Timur dengan cara merangkum semua hasil analisa dan merumuskan implikasi kebijakan dari hasil analisa tersebut.

Hasil Penelitian

Nilai Tukar Petani (NTP-BPS)

Simatupang dan Maulana (2007) menyatakan bahwa hasil perhitungan empiris nilai tukar petani seperti yang didefinisikan BPS lebih tepat disebut sebagai nilai tukar barter karena mengukur rasio indeks harga seluruh hasil produksi yang dijual petani terhadap indeks harga seluruh barang dan jasa untuk konsumsi dan produksi yang dibeli petani. Berdasarkan hasil perhitungan NTP-BPS selama tahun 2012-2014 mengalami peningkatan dari 103,83 pada tahun 2012 menjadi 104,59 pada tahun 2013 kemudian 104,74 pada tahun 2014.

Peningkatan nilai tukar petani yang terjadi dari tahun 2012 hingga 2014 berdasarkan data *year on year* merupakan pengaruh langsung dari peningkatan indeks harga yang diterima petani.

Nilai Tukar Konsumsi Petani (NTKP)

Nilai tukar konsumsi petani merupakan nilai tukar komplemen yang dinilai lebih tepat dalam mengukur daya beli hasil produksi pertanian atas barang konsumsi rumah tangga tani. Nilai tukar konsumsi petani menunjukkan daya beli riil hasil usahatani pada tahun 2013 dan 2014 lebih rendah daripada tahun 2012. Secara agregat (keseluruhan subsektor), nilai tukar konsumsi petani cenderung menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2014, dengan indikasi penurunan yang semakin besar dari tahun 2013 ke tahun 2014. Penurunan nilai tukar konsumsi mencerminkan penurunan kesejahteraan petani. Hasil perhitungan nilai tukar konsumsi petani lebih menggambarkan realita yang terjadi pada petani Jawa Timur yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan.

Nilai Tukar Faktor Produksi Usahatani (NTFP)

Nilai tukar faktor produksi usahatani merupakan nilai tukar komplemen kedua yang mengukur daya beli hasil produksi pertanian atas input produksi usahatani. Nilai tukar faktor produksi usahatani cenderung meningkat jika

dilihat secara agregat (keseluruhan subsektor). Pada tahun 2012 nilai tukar faktor produksi usahatani berada pada angka 101,86 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 106,01, kemudian diikuti peningkatan pada tahun 2014 sebesar 108,68. Peningkatan nilai tukar faktor produksi usahatani disebabkan oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 8,34 persen dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan sebesar 7,8 persen dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan nilai tukar faktor produksi usahatani merupakan indikasi peningkatan insentif produksi yang berdampak positif pada laba usahatani dan secara langsung berpengaruh pula pada kesejahteraan petani.

Pembahasan

Relevansi Nilai Tukar Petani (NTP-BPS)

Nilai tukar petani yang diterapkan BPS selama ini digunakan sebagai pengukur kemampuan riil daya beli petani masih belum memiliki hubungan langsung terhadap kesejahteraan petani. Penyusunan NTP yang dibangun oleh BPS memiliki kelemahan, diantaranya dari sisi cakupan/definisi petani yang belum sepenuhnya memasukkan seluruh subsektor dan komoditas pertanian.

Kemudian perhitungan NTP yang dinyatakan dalam bentuk indeks didasarkan pada metode indeks *Laspeyres* yang mengasumsikan tidak adanya perubahan kuantitas dalam periode pengukurannya.

Kelemahan NTP-BPS yang lain yaitu perhitungan yang didasarkan pada indeks *Laspeyres* yang bertumpu pada perubahan harga-harga pada pasar komoditas pertanian yang kompetitif. Berdasarkan struktur tata niaga produk pertanian, kenaikan harga produk yang diterima petani tidak identik dengan peningkatan pendapatan yang diterima petani. Peningkatan harga produk pertanian yang mengakibatkan NTP naik belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Timur.

Relevansi Nilai Tukar Konsumsi Petani (NTKP)

Nilai tukar konsumsi petani (NTKP) dan nilai tukar faktor produksi usahatani (NTFP) lebih memiliki hubungan yang riil dengan kesejahteraan petani. Dibuktikan dalam perhitungan NTKP dan NTFP diatas, menghasilkan angka yang lebih menggambarkan keadaan riil petani di Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2014 dimana pada tahun tersebut Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Sosia Ekonomi Nasional pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta yang terdiri dari 1,62 juta penduduk miskin di perkotaan, dan 3,24 juta penduduk miskin di pedesaan. Pada September 2014 kemiskinan di pedesaan turun menjadi 3,22 juta dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 3,26 juta karena laju inflasi yang meningkat secara

cepat dan tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan.

Relevansi Nilai Tukar Faktor Produksi Usahatani (NTFP)

NTFP dijadikan sebagai penanda profitabilitas dari usahatani begitu juga tingkat kesejahteraan petani. Hasil perhitungan nilai tukar faktor produksi usahatani menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Peningkatan dari tahun ke tahun tersebut menggambarkan bahwa insentif berusaha semakin membaik dan meningkatkan profitabilitas usahatani itu sendiri.

Nilai tukar faktor produksi mengalami peningkatan pada seluruh jenis input usahatani kecuali biaya transportasi pada tahun 2014 yang berada dibawah tahun dasar. Peningkatan drastis indeks faktor produksi usahatani pada jenis input biaya transportasi merupakan penyebab utama dari penurunan yang terjadi pada NTFP di tahun tersebut. Kenaikan bahan bakar minyak merupakan faktor utama yang menyebabkan peningkatan indeks harga faktor produksi tersebut. Penurunan satu-satunya yang terjadi pada jenis input biaya transportasi merupakan sumber utama inflasi biaya faktor produksi usahatani dalam dua tahun terakhir. Perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengendalikan harga tersebut.

Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Indeks harga yang diterima petani

Peningkatan kesejahteraan petani dapat terjadi apabila ada kebijakan jaminan harga yang dilakukan pemerintah untuk komoditas tertentu seperti beras dan gula. Kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar yang umumnya terjadi pada musim panen, melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli saat musim paceklik, dan mengendalikan inflasi melalui stabilitas harga.

Kemudian kebijakan produksi pertanian yang mencakup hal-hal seperti: (a) kebijakan terkait penyediaan lahan untuk produksi pertanian, (b) penerapan inovasi teknologi dan penyediaan infrastruktur seperti, sarana jalan, pengairan dan drainase, listrik, *farm road*, dan telekomunikasi. Selain itu kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha pada setiap komoditas tertuang dalam program khusus peningkatan kesejahteraan petani dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program PNPM Mandiri. Kedua program tersebut masih sangat relevan dalam merangsang tumbuhnya usaha di bidang pertanian.

2. Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga Pertanian

Kebijakan peningkatan kesejahteraan petani terkait pengeluaran rumah tangga tani dan penekanan harga konsumsi rumah tangga tani dilakukan pemerintah dalam hal subsidi harga: (a) pangan, seperti program pemberian

bantuan beras pada orang miskin (Raskin) yang secara langsung menekan pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, (b) pendidikan, melalui subsidi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Bantuan Operasional Sekolah, (c) perumahan, program rumah susun yang disediakan khusus untuk masyarakat kurang mampu dengan harga murah, (d) kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan persalinan, dan jaminan kematian.

3. Indeks Harga Faktor Produksi Usahatani

Kebijakan peningkatan kesejahteraan petani terkait pengeluaran rumah tangga tani dan penekanan harga faktor produksi rumah tangga tani dilakukan pemerintah dalam hal subsidi harga: (a) input produksi, dalam bentuk pemberian subsidi sarana produksi seperti benih dan pupuk, serta subsidi bunga kredit bank, (b) BBM, subsidi pada bahan bakar tertentu seperti premium yang biasa digunakan masyarakat pengguna roda dua dan angkutan umum.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hasil perhitungan kedua nilai tukar komplemen, yaitu nilai tukar konsumsi rumah tangga tani dan nilai tukar faktor produksi usahatani memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan petani. NTKP berturut-turut mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Hal tersebut menggambarkan kondisi riil dimana petani di Jawa Timur pada tahun tersebut memang mengalami penurunan daya beli terhadap barang-barang konsumsi sehari-hari karena inflasi barang konsumsi. NTFP pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari keseluruhan jenis input faktor produksi kecuali biaya transportasi pada tahun 2014 dimana pada tahun tersebut terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh langsung pada kenaikan biaya transportasi sehingga menyebabkan nilai tukar faktor produksi jenis input biaya transportasi berada dibawah indeks dasar.

Nilai tukar petani yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam memantau perkembangan kesejahteraan petani kurang tepat keterwakilannya dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Penerapan nilai tukar komplemen yang di usulkan oleh Simatupang dan Maulana dalam penelitiannya yang membahas tentang pengkajian ulang nilai tukar petani sebagai indikator penilaian tingkat kesejahteraan petani pada tahun 2007 lebih memiliki hubungan secara langsung terhadap kesejahteraan petani. Pendapat dalam penelitian tersebut telah dibuktikan dalam penilitan ini, selain itu juga sudah ada pembuktian dalam penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Simatupang dan Maulana (2007).

Kebijakan diterapkan pada masing-masing komponen perhitungan NTKP dan NTFP diantaranya: (a) indeks harga yang diterima petani (IT) dengan kebijakan harga dan kebijakan produksi pertanian; (b) indeks harga

konsumsi rumah tangga pertanian (IHKP) dengan kebijakan subsidi pangan, pendidikan, perumahan, dan kesehatan; dan (c) indeks harga faktor produksi usahatani (IHFP) dengan kebijakan subsidi harga input produksi dan BBM.

Saran

1. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dimana NTP-BPS belum memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kesejahteraan petani, disarankan Badan Pusat Statistik menyertakan setidaknya kedua nilai nilai tukar komplemen dalam perhitungan Nilai Tukar Petani. Pengkajian ulang alat ukur yang digunakan BPS selama ini perlu dilakukan karena berdasarkan perhitungan NTP saja masih belum cukup valid dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Selain kedua nilai tukar komplemen yang di sarankan dalam penelitian ini juga masih terdapat alternatif perhitungan nilai tukar lain, seperti Nilai Tukar Bruto Petani (NTBP) yang menggambarkan rasio indeks kuantitas produk yang dihasilkan petani terhadap indeks kuantitas barang konsumsi petani. Kemudian Nilai Tukar Pendapatan Petani (NTPP) yang lebih menggambarkan rasio nilai produksi hasil usahatani terhadap indeks harga barang konsumsi rumah tangga tani.

2. Berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukkan penurunan tingkat kesejahteraan petani dari tahun 2012 hingga 2014, maka perlu adanya upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani terutama petani di Jawa Timur perlu adanya pengendalian inflasi di tingkat pedesaan, karena selama ini fokus pemerintah hanya mengendalikan inflasi yang berskala nasional atau secara umum saja. Cerminan inflasi skala nasional masih belum sepenuhnya menggambarkan inflasi yang terjadi di pedesaan. Bentuk pengendalian pemerintah seperti mengendalikan harga pupuk dan bahan bakar minyak akan sangat membantu peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- [1] BAPPEDA. 2015. *Buku Data Dinamis Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.
- [2] Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- [3] BPS. 2012. *Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.
- [4] BPS. 2013. *Sensus Pertanian Indonesia*. Jakarta.
- [5] BPS. 2013. *Sensus Pertanian Jawa Timur*. Surabaya.
- [6] BPS. 2013. *Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.
- [7] BPS. 2014. *Berita Resmi Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.
- [8] BPS. 2014. *Sensus Pertanian Indonesia*. Jakarta.
- [9] BPS. 2014. *Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.
- [10] BPS. 2015. *Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.
- [11] Dewi, I Gusti Ayu Chintya, I Ketut Suambadan I G.A.A Ambarawati. 2012. *Analisis Efisiensi Usahatani Padi Sawah (Studi Kasus di Subak Pacung Babakan, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)*. Agribisnis dan Agrowisata, Vol. 1(1): 1-10
- [12] Hendayana, Rachmat. 2001. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- [13] Hutabarat, B. 1995. *Analisis Deret Waktu Kecenderungan Nilai Tukar Petani di Indonesia*. Jurnal Agroekonomi : 4(2):55-65.
- [14] Itoni Purba, Teddy. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Padi di Indonesia Tahun 2008-2012*. Skripsi. Universitas Jember. Jember.
- [15] Nasikun, Dr. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia ke Tiga*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- [16] Nurasa, Tjetjep dan Muchjidin Rahmat. 2013. *Nilai Tukar Petani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- [17] Parabawati, Achadyah. 2011. *Posisi Nilai Tukar Petani Padi dengan Nilai Tukar Petani Komoditas Pangan*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi. Jember.
- [18] Rachmat, Muchjidin. 2000. *Analisa Nilai Tukar Petani Indonesia*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- [19] Rachmat, Muchjidin. 2013. *Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran, dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- [20] Raharja, Prathama. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Lembaga Fakultas UI, Jakarta.
- [21] Ruauw, Eyverson. 2010. *Nilai Tukar Petani sebagai Indikator Kesejahteraan Petani*. ASE Volume 6 No.2.
- [22] Rusosno, N., Anwar Sunari, Ade Candradijaya, Ifan Martino, Tejaningsih. 2013. *Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019*. Laporan Hasil Penelitian. Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas. Jakarta.
- [23] Sadikin, Ikin dan Kasdi Subagyo. 2008. *Kinerja Beberapa Indikator Kesejahteraan Petani Padi di Perdesaan Kabupaten Kerawang 2008*. *Sektor Pertanian*. Jurnal Agroekonomi: 11(1):33-48.
- [24] Simatupang, P. 1992. *Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Barter Sektor Pertanian*. Jurnal Agroekonomi: 11(1):33-48.
- [25] Simatupang, P. dan B. Isdijoso. 1992. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Sektor Pertanian*. Landasan Teoritis dan Bukti Empiris. Ekonomi dan Keuangan Indonesia 40(1):33-48.
- [26] Simatupang, P. dan M. Maulana. 2007. *Kaji Ulang Konsep dan Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2003-2006*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta
- [27] Sugiyarto dkk. 2007. *Ekonomi Mikro*. Gramedia Pustaka: Jakarta.
- [28] Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Pusat Bahasa Depdiknas. Bandung.
- [29] Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- [30] Whitney, F.L. 1960. *The Elements of Research*. Asian Eds. Osaka: Overseas Book co.
- [31] https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur. Diakses pada 23 Februari 2016 pukul 09.13 WIB
- [32] <https://bpnjatim.wordpress.com/profil-jawa-timur/>. Diakses pada 23 Februari 2016 pukul 09.15 WIB
- [33] <https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/>. Diakses pada 02 Maret 2016 pukul 15.23 WIB.
- [34] <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/164564/bps-angka-kemiskinan-wilayah-pedesaan-jatim-naik>. Diakses pada 08 April 2016 pukul 07.08 WIB.
- [35] http://www.academia.edu/14913621/analisis_kemiskinan_jawatimur_tahun_1990-2015. Diakses pada 08 April 2016 pukul 07.14 WIB.
- [36] <https://m tempo.co/read/news/2014/01/03/173541819/orang-miskin-jawa-timur-terbanyak-di-indonesia>. Diakses pada 08 April 2016 pukul 07.14 WIB.